

Model Power-Sharing Swiss: Kajian Pemerintahan dan Hukum Konstitusi terhadap Representasi Multietnis dan Linguistik

Harky Ristala¹, Firdaus Muhamad Iqbal²

¹Universitas Jenderal Achmad Yani, Jawa Barat, Indonesia

²Universitas Islam Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email Koresponden: harky.ristala@lecture.unjani.ac.id

Abstrak

Swiss merupakan salah satu contoh paling menonjol dari negara multietnis dan multilinguistik yang berhasil menjaga stabilitas politik melalui model *power-sharing* yang terinstitusionalisasi secara kuat dalam kerangka hukum konstitusional dan praktik pemerintahan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana interaksi antara desain hukum konstitusi, federalisme linguistik, prinsip kolegialitas, serta mekanisme demokrasi langsung membentuk sistem pembagian kekuasaan yang inklusif dalam pemerintahan Swiss, khususnya pada tingkat Dewan Federal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif dengan studi kepustakaan melalui analisis dokumen hukum, konstitusi, literatur akademik, dan sumber kebijakan resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan empat bahasa nasional, larangan diskriminasi berbasis bahasa, serta prinsip subsidiaritas menciptakan fondasi hukum yang menjamin kesetaraan antar komunitas linguistik. Prinsip kolegialitas dan penerapan *magic formula* dalam Dewan Federal berfungsi sebagai mekanisme konsosiasional yang mencegah dominasi mayoritas dan menjaga keseimbangan representasi politik. Efektivitas model ini diperkuat oleh demokrasi langsung dan kewajiban evaluasi kebijakan sebagaimana diatur dalam Konstitusi Swiss. Lebih jauh, sistem konsensus Swiss terbukti mampu mengintegrasikan kelompok minoritas linguistik, termasuk komunitas penutur bahasa Romansh, ke dalam struktur politik dan hukum negara secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa *power-sharing* di Swiss bukan sekadar praktik politik, melainkan fondasi hukum institusional yang relevan sebagai rujukan bagi negara multikultural lainnya.

Kata kunci : Power-Sharing, Swiss, Kolegialitas, Pemerintahan, Hukum Konstitusi

Pendahuluan

Swiss, secara resmi bernama Konfederasi Swiss, adalah sebuah negara yang tidak memiliki garis pantai dan terletak pada pertemuan antara Eropa Tengah, Barat, dan Selatan (Berner & Berner, 2012). Swiss merupakan negara yang amat khas dari sisi keragaman linguistik dan etnik, empat bahasa nasional (Jerman, Perancis, Italia, dan Romansh) membentuk landasan identitas politik dan administratif negara, sehingga menuntut



pengaturan institusional yang sensitif terhadap perbedaan tersebut. Multilingualisme bukan sekadar fakta demografis, tetapi bagian dari kontrak sosial yang terus direproduksi melalui kebijakan pendidikan, administrasi publik, dan praktik politik di tingkat federal maupun kanton; kajian terbaru menekankan bagaimana kebijakan bahasa dan akomodasi teritorial berperan penting dalam menjaga kohesi nasional (Belser & Mazidi, 2022).

Swiss merupakan entitas politik yang berkembang melalui proses *bottom-up*, yakni bertumpu pada pembentukan dari tingkat lokal menuju tingkat nasional. Pola ini berbeda dengan banyak negara lain yang lahir melalui pendekatan *top-down*, misalnya melalui ekspansi teritorial atau aliansi dinasti. Fondasi nilai dan mekanisme demokrasi Swiss dibangun atas prinsip kerja sama antarkomunitas, penyelenggaraan pemerintahan pada skala kecil, serta partisipasi warga dalam proses politik. Oleh karena itu, sebagian pengamat menilai bahwa karakter politik Swiss memiliki nuansa tradisional atau bahkan menyerupai praktik-praktik zaman abad pertengahan. Penilaian tersebut tidak sepenuhnya keliru, sebab dua institusi kunci dalam sistem politik Swiss federalisme dan demokrasi langsung memiliki kesinambungan historis yang panjang dan relatif tidak terputus (Linder & Mueller, 2021).

Dalam konteks itu, Swiss mengembangkan model *power-sharing* yang unik, eksekutif kolektif yang dijalankan oleh tujuh anggota Dewan Federal (*Federal Council*) bekerja berdasarkan prinsip kolegialitas (*Kollegialitätsprinzip*), di mana keputusan diambil secara kolektif dan seluruh anggota bertanggung jawab bersama. Praktik *collegiality* dan konsensus ini membentuk karakter pengambilan kebijakan yang menekankan kompromi, perlindungan hak komunitas linguistik, dan stabilitas pemerintahan sebuah praktik yang terus dijelaskan dan dipromosikan oleh sumber resmi pemerintahan Swiss (The portal of the Swiss government, 2025b).

Selain aspek kolegial, distribusi kursi di Dewan Federal sering dijelaskan melalui praktik politik yang dikenal sebagai “*magic formula*” sebuah konvensi politik yang meski bukan aturan hukum tertulis,

menentukan pembagian kursi berdasarkan keseimbangan partai, region, dan representasi sosial sehingga hasil akhir cenderung merefleksikan komposisi etnolinguistik masyarakat. Konvensi semacam ini menunjukkan bahwa stabilitas model Swiss bergantung pada campuran norma hukum konstitusional (misal ketentuan tentang federalisme dan bahasa) dan praktik politik tidak tertulis yang mengatur representasi praktis di eksekutif (Linder & Mueller, 2021).

Meski sering dipuji karena kemampuannya mengelola pluralitas tanpa kekerasan politik, model *power-sharing* Swiss tetap menghadapi tantangan kontemporer termasuk desakan perubahan komposisi golongan, isu representasi kelompok kecil (misal Romansh), dan tekanan eksternal seperti migrasi dan krisis geopolitik yang menuntut kajian terpadu antara ilmu pemerintahan (governance, administrasi publik) dan hukum konstitusi (jaminan hukum, prinsip *equality*, dan formalisasi kebiasaan politik). (Freiburghaus, 2024).

Oleh sebab itu, artikel ini berupaya menelaah secara interdisipliner bagaimana aturan hukum dan praktik pemerintahan berinteraksi dalam membentuk pola representasi kelompok etnis dan bahasa di dalam *Federal Council*, serta menyoroti pelajaran yang dapat diambil bagi negara lain yang memiliki karakter masyarakat multikultural. Analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan desain institusional dalam konteks masyarakat majemuk.

Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu elemen fundamental dalam menganalisis suatu permasalahan. Metode penelitian, dalam hal ini, merujuk pada pendekatan yang dirancang secara sistematis dan konsisten untuk mengungkap kebenaran serta menyelesaikan masalah, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan (Iqbal, 2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial politik hukum secara mendalam. Selain itu, metode kualitatif eksploratif memungkinkan peneliti

untuk mengkaji kompleksitas melalui interpretasi mendalam terhadap data kontekstual dan historis yang relevan (Abidin AS & Iqbal, 2025).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui desain tematik, naratif, atau diskursif. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta memperkuat landasan teoritis yang mendukung kajian ini (Munadi, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yakni sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema sosial, kemudian dianalisis dengan memperhatikan struktur semantik dan konteks sosial yang melatarbelakangi penelitian (Riyadi & Bashori, 2025).

Penelitian ini diawali dengan identifikasi isu utama terkait penerapan model power-sharing dalam sistem pemerintahan Swiss, khususnya mengenai representasi multietnis dan multilinguistik, dengan menelaah landasan historis negara Swiss, perkembangan federalisme, serta prinsip kolegialitas yang menjadi karakter Dewan Federal. Data sekunder kemudian dikumpulkan melalui dokumen hukum dan konstitusional Swiss seperti Konstitusi Federal (*Bundesverfassung*), ketentuan bahasa nasional, serta regulasi administratif yang relevan, disertai kajian terhadap jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan tematik dan analitis untuk memahami hubungan antara pengaturan hukum dan praktik pemerintahan, khususnya bagaimana mekanisme *power sharing* baik melalui ketentuan hukum maupun konvensi politik menghasilkan representasi kelompok bahasa dan komunitas etnis dalam struktur eksekutif Swiss.

Pembahasan/hasil

A. Power-Sharing dan Kerangka Hukum dalam Sistem Pemerintahan Multietnis dan Lingusitik di Swiss

Power sharing atau pembagian kekuasaan dipandang sebagai sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa perputaran elite berjalan melalui prinsip representasi politik. Identitas seperti etnis, agama, bahasa, maupun zona tidak ditempatkan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk

membangun harmoni dalam politik dan pemerintahan. Selain itu *power sharing* merupakan pilihan politik yang paling rasional untuk diterapkan dalam masyarakat multietnis (Haboddin & Afala, 2021). Pembagian kekuasaan antarsegmen berfungsi untuk mengurangi konflik dan mencapai stabilitas politik dengan mengurangi konsentrasi kekuasaan pada segmen tertentu serta memungkinkan dari berbagai kelompok untuk terlibat dalam pengelolaan kekuasaan dan pengambilan keputusan kolektif. (Trzciński, 2022).

Orang Swiss menyukai *power-sharing* dengan alasan adil jika semua bahasa, wilayah, dan partai politik diwakili dalam pemerintahan. Ini lebih baik bagi negara karena Swiss membutuhkan kompromi politik, bukan keputusan mayoritas. Sejarah menunjukkan bahwa Swiss, karena keberagamannya, hanya mampu menjaga stabilitas dalam jangka panjang melalui sistem politik berbasis konsensus bukan pertikaian antara mayoritas dan minoritas (Linder & Mueller, 2021).

Pada Konstitusi 1848 sebagai dasar pendirian Negara Swiss mendefinisikan Federasi Swiss sebagai komunitas bangsa dari kanton-kanton. Berbeda dengan penyatuan Jerman dan Italia pada masa itu, Swiss mendasarkan konsep negaranya bukan pada kesamaan budaya, agama, atau bahasa, melainkan pada kesamaan status kewarganegaraan di antara berbagai komunitas kanton. Dengan demikian, Swiss adalah contoh negara politik atau sipil, bukan negara yang dibangun berdasarkan kesamaan etnis atau budaya (Kley, 2023).

Berbagai kanton menunjukkan bahwa negara ini sejak awal dibangun bukan atas dasar homogenitas etnis, budaya, agama, atau bahasa, tetapi atas dasar kesetaraan status kewarganegaraan. Karakter ini menjadi fondasi penting bagi praktik *power sharing* dalam masyarakat multietnis Swiss, karena struktur politiknya tidak memberikan keistimewaan kepada kelompok etnis atau linguistik tertentu, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah penduduk dan sebaran komunitas bahasa. Dengan memilih identitas politik yang bersifat sipil, Swiss menciptakan ruang bagi seluruh kelompok untuk diposisikan sebagai mitra setara dalam tatanan federal. Sehingga, keberhasilan Swiss bukan

terletak pada keseragaman identitas etnis, tetapi pada kemampuan institusinya mengelola keberagaman secara setara melalui distribusi kekuasaan yang inklusif.

Lalu, sebagaimana dalam Bagian 1 Ayat 4 (Swiss Federal Constitution, 1999) bahwa Bahasa Nasional adalah Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Italia, dan Bahasa Romansh. Negara ini mengakui empat bahasa nasional dan jika keragaman bahasa dan kantonnya saja bisa sinkron, mungkin masih masuk akal. Namun, faktanya 17 kanton menggunakan bahasa Jerman, 4 kanton bahasa Perancis, 3 kanton dwibahasa, 1 kanton bahasa Italia, dan 1 kanton trilingual (Jerman, Italia, dan Romansh) (Linder & Mueller, 2021). Lalu dikuatkan dalam Bagian 2 Bab 1 Ayat 8 (Swiss Federal Constitution, 1999) bahwa tidak seorang pun boleh didiskriminasi, khususnya berdasarkan asal usul, ras, jenis kelamin, usia, bahasa, kedudukan sosial, cara hidup, keyakinan agama, ideologi, atau politik, atau karena cacat fisik, mental, atau psikologis.

Konstitusi Federal Swiss yang mengakui empat bahasa nasional menjadi fondasi penting bagi *power sharing* dalam sistem linguistik sekaligus penegasan prinsip sama di hadapan hukum. Meskipun terdapat ketidakseimbangan demografis dengan 17 kanton, kerangka konstitusional memastikan bahwa tidak ada komunitas linguistik yang dapat mendominasi secara politik maupun administratif. Jaminan dalam Bagian 2 Bab 1 Ayat 8 yang melarang diskriminasi berdasarkan bahasa memperkuat bahwa setiap warga, tanpa memandang latar linguistiknya, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, pengaturan linguistik dalam konstitusi bukan hanya mekanisme perlindungan minoritas, tetapi juga bentuk pembagian kekuasaan yang memastikan setiap kelompok bahasa memperoleh representasi, hak, dan perlakuan setara dalam sistem politik Swiss, sehingga keberagaman linguistik beroperasi dalam kerangka kesetaraan hukum dan stabilitas konsosiasional.

Konsep *power sharing* menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan merupakan instrumen politik dan hukum yang secara fungsional dirancang untuk mengelola keragaman etnis dan bahasa dalam suatu negara. Dalam masyarakat multietnis dan multibahasa, potensi fragmentasi politik dapat

meningkat apabila distribusi kekuasaan terkonsentrasi pada satu kelompok dominan, oleh karena itu, mekanisme *power sharing* berupaya memastikan bahwa identitas etnis maupun linguistik tidak bertransformasi menjadi sumber kompetisi destruktif, melainkan menjadi basis representasi yang dilembagakan secara formal.

Hal ini tercermin yang menekankan bahwa *power sharing* menjadi pilihan rasional dalam masyarakat heterogen karena memungkinkan rotasi elite dari berbagai kelompok etnokultural secara demokratis. Sejalan dengan itu, *power sharing* tidak hanya berfungsi sebagai sarana stabilisasi politik, tetapi juga sebagai perangkat konstitusional yang mengintegrasikan pluralitas etnis dan bahasa ke dalam struktur pemerintahan, memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut memperoleh ruang representasi yang proporsional dan legitimasi dalam proses politik nasional.

Oleh karena itu, keberhasilan Swiss sebagai negara multietnis dan multilinguistik bertumpu pada penerapan pembagian kekuasaan yang berakar pada kerangka hukum dan identitas politik yang bersifat sipil. Sejak Konstitusi 1848, Swiss tidak dibangun atas dasar homogenitas etnis atau bahasa, tetapi atas kesetaraan kewarganegaraan antarkanton, sehingga setiap kelompok diposisikan sebagai mitra setara dalam struktur federal. Swiss mampu mengurangi potensi konflik dan menjaga stabilitas dengan memastikan semua komunitas—baik etnis maupun linguistik—memiliki akses terhadap kekuasaan dan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, *power sharing* di Swiss bukan sekadar mekanisme politik, tetapi fondasi institusional yang memungkinkan keberagaman dikelola secara inklusif dalam kerangka kesetaraan hukum dan integrasi nasional.

B. Mekanisme Pemerintahan dan Pengaturan Hukum Konstitusional dalam Pembagian Kekuasaan di Dewan Federal

Dewan Federal sesuai dalam Bab 3 Bagian 1 Pasal 175 Ayat 1 (Swiss Federal Constitution, 1999) merupakan kabinet yang terdiri dari tujuh anggota. Secara kolektif berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjadikan salah satu model eksekutif kolegiat paling unik di dunia. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Dewan Federal dibentuk

berdasarkan sebuah konvensi politik yang menekankan pemerintahan koalisi besar permanen, yang mencakup representasi partai-partai utama serta wilayah-wilayah bahasa di Swiss. Meskipun keseluruhan Dewan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan federal, setiap anggota memimpin satu dari tujuh departemen eksekutif tanpa mengurangi sifat kolegal dalam pengambilan keputusan (Stojanović, 2016).

Presiden Swiss bukanlah seperti presiden di Austria atau Jerman yang merupakan kepala Negara. Berdasarkan Konstitusinya bahwa Dewan Federal juga bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Presiden Konfederasi berperan sebagai ketua Dewan tanpa kewenangan khusus, bersifat *primus inter pares*, dan dipilih melalui rotasi tahunan di antara tujuh anggota. Dewan Federal sendiri dipilih sebagai satu badan oleh 246 anggota Majelis Federal untuk masa jabatan empat tahun tanpa mekanisme mosi tidak percaya maupun penarikan mandat, sementara masa jabatan anggota biasanya berulang karena petahana hampir selalu terpilih kembali dan umumnya menjabat antara delapan hingga dua belas tahun. Selain itu, Kanselir Swiss bertindak sebagai kepala staf administratif bagi Dewan Federal, namun tidak memiliki kedudukan sebagai anggota kedelapan dalam struktur kolegal tersebut (Stojanović, 2016).

Pada pembagian kekuasaan di Dewan Federal, pembahasan mengenai prinsip kolegalitas menjadi semakin signifikan karena struktur eksekutif Swiss dirancang sebagai bentuk pemerintahan kolektif yang menolak hierarki dan dominasi individu. Struktur Dewan Federal yang terdiri dari tujuh anggota dan berfungsi sebagai *collective head of state* semakin menegaskan bahwa pembagian kekuasaan merupakan inti dari arsitektur politik Swiss. Tidak seperti banyak negara lain yang menempatkan kekuasaan eksekutif pada seorang presiden atau perdana menteri. Pada level organisasi internal, pembahasan memperlihatkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam eksekutif federal sangat dipengaruhi oleh prinsip kolegalitas, meskipun dalam praktiknya prinsip tersebut terus diuji oleh proses departementalisasi dan meningkatnya polarisasi politik (Papadopoulos & Sager, 2023).

Pembagian kekuasaan di Dewan Federal juga terlihat sesuai Pasal 178 (Swiss Federal Constitution, 1999) Pemerintahan Federal diorganisasikan menjadi Departemen, setiap Departemen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Federal dengan rincian saat ini (The portal of the Swiss government, 2025a) :

1. Guy Parmelin dari Partai Rakyat Swiss (SVP) yang berasal dari Vaud menjabat sebagai Wakil Presiden 2025 sekaligus memimpin Departemen Federal Urusan Ekonomi, Pendidikan, dan Penelitian.
2. Ignazio Cassis dari Partai Liberal (FDP) mewakili Ticino dan mengepalai Departemen Luar Negeri Federal.
3. Karin Keller-Sutter, juga dari Partai Liberal dan berasal dari St. Gallen, bertugas sebagai Presiden 2025 serta memimpin Departemen Keuangan Federal.
4. Albert Rosti dari SVP yang mewakili Bern dan memimpin Departemen Lingkungan Hidup, Transportasi, Energi, dan Komunikasi,
5. Elisabeth Baume-Schneider dari Partai Sosial Demokrat (SP) yang berasal dari Jura dan mengepalai Departemen Dalam Negeri Federal.
6. Beat Jans dari SP yang mewakili Basel-Stadt mulai memimpin Departemen Kehakiman dan Kepolisian Federal.
7. Martin Pfister dari Partai Tengah (Die Mitte) yang berasal dari Zug dan kini memimpin Departemen Pertahanan, Perlindungan Sipil, dan Olahraga Federal.

Susunan ini menunjukkan distribusi kekuasaan yang seimbang antarpantai, wilayah, dan kelompok linguistik sebagai ciri khas pemerintahan kolegiat Swiss. Struktur Dewan Federal Swiss sebagai eksekutif kolegiat menunjukkan bahwa model pemerintahan ini merupakan perwujudan paling nyata dari prinsip *power-sharing*. Dengan berfungsi secara kolektif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Dewan Federal menghindari dominasi individu dan menekankan pengambilan keputusan berbasis konsensus melalui penerapan prinsip kolegialitas.

Keseimbangan representasi tersebut tidak hanya menunjukkan bagaimana prinsip kolegialitas bekerja dalam praktik, tetapi juga menegaskan bahwa stabilitas sistem eksekutif Swiss sangat bergantung

pada mekanisme pembagian kekuasaan yang terinstitusionalisasi. Struktur Dewan Federal yang beroperasi sebagai *collective head of state* memungkinkan setiap anggota berkontribusi secara setara dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keberagaman etnolinguistik dan politik dapat diakomodasi tanpa menimbulkan dominasi satu kelompok. Dalam kerangka inilah kebutuhan akan formula representasi yang stabil dan dapat diprediksi muncul, mendorong terciptanya suatu model pembagian kekuasaan yang lebih terstruktur di tingkat eksekutif.

Pada tahun 1959, setelah periode singkat tanpa keterlibatan Sosial-Demokrat, lahirlah apa yang disebut "*magic formula*". Dalam politik Swiss, rumus ajaibnya adalah rumus aritmatika untuk membagi tujuh kursi eksekutif di Dewan Federal di antara empat partai koalisi. Hingga tahun 2003, Dewan Federal terdiri dari dua anggota Radikal, dua anggota Demokrat-Kristen, dua anggota Sosial-Demokrat, dan satu anggota Partai Rakyat Swiss (SVP). Setelah pemilu 2003, ketika SVP menjadi partai terbesar dan memperoleh kursi kedua dengan mengurangi jatah Demokrat-Kristen, formula *power-sharing* yang disesuaikan ini tetap berlaku kecuali pada periode 2008–2015 (Andina, 2023).

Dalam konteks Swiss, gagasan mengenai pembagian kekuasaan tersebut menemukan bentuk institusionalnya yang paling nyata melalui penerapan prinsip kolegialitas (*Kollegialitätsprinzip*) dalam Dewan Federal. Diperkuat melalui Bab 3 Bagian 1 Pasal 177 (Swiss Federal Constitution, 1999) bahwa berdasarkan Ayat (1) Dewan Federal mengambil keputusannya sebagai badan kolegial dan Ayat (2) Untuk keperluan persiapan dan pelaksanaan, urusan Dewan Federal dialokasikan kepada masing-masing anggotanya menurut departemen, lalu Ayat (3) Bisnis dapat didelegasikan kepada dan ditangani langsung oleh departemen atau unit administratif bawahannya dalam kasus seperti itu, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dijamin. Sehingga Prinsip kolegialitas (*Kollegialitätsprinzip*) sebagai norma hukum-politik dalam struktur pemerintahan Swiss.

Prinsip kolegialitas merupakan representasi multietnis dan multilinguistik yang sebelumnya hanya terwujud dalam komposisi anggota Dewan Federal. Penguatan prinsip tersebut melalui pasal 177 Konstitusi

Swiss menjadi bukti bahwa kolegialitas bukan sekadar tradisi politik, tetapi sebuah norma hukum yang mengikat dan mendefinisikan karakter eksekutif Swiss. Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, pembagian tugas departemental disusun secara seimbang, dan mekanisme delegasi tetap menjamin hak atas dukungan hukum.

Dengan demikian, penerapan prinsip kolegialitas berfungsi menjaga distribusi kekuasaan yang inklusif, mencegah dominasi kelompok mayoritas, dan mengoperasionalkan nilai-nilai konsosiasional yang menjadi fondasi stabilitas politik Swiss. Prinsip ini tidak hanya memfasilitasi koordinasi antaranggota kabinet, tetapi juga menjaga kesatuan eksekutif di tengah keberagaman linguistik dan regional, menjadikannya salah satu instrumen hukum-politik paling sentral dalam keberhasilan model demokrasi Swiss.

Dalam kerangka tersebut, prinsip kolegialitas yang mengatur kerja kolektif Dewan Federal tidak dapat dipahami secara terpisah dari landasan konstitusional yang membentuk struktur negara Swiss. Dengan demikian, keberlanjutan dan legitimasi praktik *power-sharing* berbasis kolegialitas sangat bergantung pada kedudukan hukum Konstitusi Federal Swiss (*Bundesverfassung*) yang secara eksplisit menetapkan bahasa-bahasa nasional dan prinsip federalisme linguistik sebagai kerangka dasar pengelolaan keberagaman. Dalam konteks ini, konstitusi bukan sekadar dokumen hukum tertinggi, melainkan instrumen yang menentukan bagaimana representasi linguistik diakomodasi dalam lembaga-lembaga negara.

Konstitusi menjadi ruh yang penting bagi Swiss dan memiliki karakter yang unik mengenai bentuk negara. Sementara untuk Swiss, Konstitusinya adalah perjanjian sosio-politik yang menyusun aturan-aturan dasar untuk pembangunan demokratis masyarakat dan untuk koeksistensi damai antara berbagai teritorial negara bagian Federal dan penduduknya. Preamble konstitusi Swiss mengakui prinsip solidaritas sebagai salah satu nilai fundamental yang mengatur masyarakat Swiss dan mendefinisikan semangat negara sebagai satu dalam solidaritas dan keterbukaan terhadap

dunia, tertanam dalam nilai-nilai penting seperti keberagaman, demokrasi dan pertimbangan bersama. (Razak & Septaviana, 2022)

Di Swiss, Konstitusi menjamin otonomi Kanton dengan adanya prinsip subsidi memastikan bahwa semua tugas yang tidak secara eksplisit ditugaskan ke tingkat federal berada dalam tanggung jawab Kanton (Kanton adalah sebagai konstituen dari konfederasi Swiss, secara teoritis dan historis, mereka adalah negara semi-berdaulat. Istilah ini diambil dari kata bahasa prancis, *canton* yang berarti sudut atau distrik di mana Kanton bertanggung jawab atas implementasi hukum federal. Pengaturan federal yang sangat terdesentralisasi ini telah terbukti efektif dalam melindungi perbedaan budaya, pengakuan, dan bahasa. Penggunaan referendum opsional mengubah sistem politik Swiss menjadi demokrasi konsosiasional (Füglister & Wasserfallen, 2014).

Oleh karena itu, penerapan *magic formula* berhasil menginstitutionalisasi model *power-sharing* yang stabil dan inklusif dengan rumus representasi antarpolisi. Kolegialitas yang terikat norma hukum ini memperkuat fungsi Dewan Federal sebagai eksekutif kolektif yang mampu menjaga koordinasi, mencegah polarisasi, dan mengakomodasi keragaman etnolinguistik dalam proses pemerintahan. Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan model ini tidak dapat dipisahkan dari karakter konstitusional Swiss yang menjamin federalisme linguistik, otonomi kanton, dan prinsip subsidiaritas, di mana konstitusi berfungsi sebagai perjanjian sosio-politik yang mengatur koeksistensi damai antarkelompok serta menegaskan nilai solidaritas, demokrasi, dan keberagaman sebagai dasar kehidupan bernegara.

C. Evaluasi Efektivitas Model Power-Sharing Swiss dalam Perspektif Pemerintahan dan Hukum Konstitusi

Sistem demokrasi langsung Swiss, yang tercermin dalam konstitusi federalnya, telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik di tengah keragaman etnis dan bahasa. Konstitusi Swiss mengakui empat bahasa resmi dan menjamin representasi yang adil bagi kanton-kanton kecil, sehingga membantu mengurangi potensi konflik antar kelompok etnis

dan bahasa. Sistem referendum dan inisiatif memungkinkan warga negara untuk secara langsung terlibat dalam proses pembuatan keputusan, meningkatkan legitimasi dan akseptabilitas kebijakan. Proses politik Swiss menekankan pentingnya kompromi dan konsensus, mendorong dialog dan negosiasi antar kelompok yang berbeda. Struktur federal Swiss memberikan otonomi yang cukup besar kepada kanton-kanton, memungkinkan mereka untuk mengelola urusan internal mereka sendiri dan mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, hukum konstitusi Swiss telah efektif dalam menjaga stabilitas politik di tengah keragaman etnis dan bahasa dengan menciptakan sistem yang inklusif, partisipatif, dan adaptif (Hosli et al., 2025).

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 170 (Swiss Federal Constitution, 1999) menyebutkan bahwa Majelis Federal (lembaga legislatif Swiss) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kebijakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah federal dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Dengan kata lain, pasal ini mewajibkan pemerintah federal untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuannya dan efektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang multienis dan multibahasa.

Lalu dalam perspektif pemerintahan dan hukum konstitusi efektivitas model *power-sharing* Swiss memiliki kaitan dalam beberapa aspek, seperti pengambilan keputusan yang inklusif, desentralisasi dan otonomi, keterlibatan warga, serta transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan berbasis data dapat membantu meningkatkan legitimasi keputusan dengan mempertimbangkan preferensi warga dan memprioritaskan investasi yang berdampak pada kualitas hidup mereka. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu kota-kota seperti Aarau dalam membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya, meningkatkan partisipasi warga dalam

proses pengambilan keputusan, dan membuat keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga (Wellings et al., 2023).

Efektivitas model *power-sharing* Swiss sangat bergantung pada sinergi antara desain hukum konstitusi, mekanisme demokrasi langsung, dan struktur federal yang terdesentralisasi. Pengakuan konstitusional terhadap empat bahasa resmi dan jaminan representasi bagi kanton kecil menciptakan fondasi hukum yang melindungi pluralitas etnis-linguistik dan mencegah dominasi mayoritas, sehingga memperkuat integrasi nasional. Mekanisme referendum dan inisiatif rakyat, sebagaimana dikemukakan oleh (Hosli et al., 2025) memperkuat legitimasi kebijakan melalui keterlibatan langsung warga, meminimalkan potensi konflik, dan memberikan ruang bagi minoritas untuk mengoreksi kebijakan pada tingkat federal.

Pasal 170 Konstitusi Swiss semakin memperkuat kerangka ini dengan mewajibkan evaluasi kebijakan secara sistematis, memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap efektif, relevan, dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat multietnis dan multibahasa. Selain itu, pendekatan partisipatif berbasis data sebagaimana diuraikan oleh (Wellings et al., 2023) menunjukkan bahwa praktik pemerintahan Swiss tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga mengandalkan inovasi administratif untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas. Dengan demikian, model *power-sharing* Swiss tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme representasi politik, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan adaptif yang memadukan inklusivitas, evaluasi berkelanjutan, dan partisipasi warga dalam menjaga stabilitas di tengah keragaman etnolinguistik.

Keberlanjutan efektivitas model *power-sharing* Swiss yang ditopang oleh evaluasi kebijakan, partisipasi warga, dan inovasi administratif tersebut pada akhirnya tidak hanya dapat diukur dari stabilitas institusional atau kualitas tata kelola pemerintahan semata, tetapi juga dari sejauh mana sistem konsensus mampu mengintegrasikan kelompok-kelompok minoritas ke dalam struktur politik dan hukum negara. Dalam konteks masyarakat multietnis dan multibahasa seperti Swiss, integrasi minoritas menjadi indikator kunci keberhasilan pemerintahan konsosiasional, karena menyangkut pengakuan, representasi, dan

perlindungan hak-hak kelompok yang secara demografis lebih kecil. Sehingga, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana kerangka hukum konstitusional dan praktik pemerintahan berbasis konsensus berdampak langsung terhadap integrasi kelompok minoritas, termasuk minoritas linguistik seperti komunitas penutur bahasa Romansh.

Bahasa Romansh, dari 100% bahasa di swiss hanya sekitar 0,6% penutur dan merupakan bahasa minoritas yang sebagian besar berasal dari bahasa Latin dan dituturkan di beberapa wilayah Pegunungan Alpen di Swiss bagian tenggara. Federalisme, sebagai prinsip dasar, memungkinkan minoritas penutur bahasa Romansh, Italia, dan Prancis untuk mempertahankan serta mengembangkan budaya mereka sendiri dalam batas-batas kanton milik mereka. Lebih jauh, karena mereka merupakan kelompok mayoritas di kanton masing-masing, mereka juga memiliki suara politik dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan pusat. Pentingnya suara politik ini secara historis dapat ditunjukkan oleh fakta bahwa hingga tahun 1974, anggota Dewan Nasional Swiss duduk berdasarkan blok-blok linguistik (Linder & Mueller, 2021).

Penerapan multibahasa memang menuntut pengeluaran publik serta redistribusi fiskal yang berpihak pada kelompok minoritas, namun beban tersebut secara konsisten diterima oleh masyarakat Swiss. Hal ini tercermin dari keberadaan empat jaringan radio dan televisi publik yang lengkap, masing-masing melayani satu kelompok bahasa. Jaringan media untuk kelompok linguistik minoritas bahkan memperoleh porsi anggaran nasional yang lebih besar dibandingkan proporsi pendapatannya; sebagai contoh, pada tahun 2018 Radio Télévision Suisse yang hanya menghasilkan 23% dari total pendapatan justru menerima 33% alokasi anggaran (Linder & Mueller, 2021).

Bahasa Romansh yang hanya dituturkan oleh sekitar 0,6% penduduk Swiss menunjukkan posisi minoritas linguistik yang sangat kecil secara demografis, namun tetap memperoleh perlindungan dan integrasi yang kuat melalui desain hukum dan pemerintahan Swiss. Prinsip federalisme linguistik memungkinkan komunitas penutur Romansh, bersama dengan penutur bahasa Italia dan Prancis, untuk

mempertahankan serta mengembangkan identitas budaya dan bahasanya dalam kerangka otonomi kanton, sehingga pengakuan tidak bergantung pada jumlah penutur semata. Pada tingkat pemerintahan, status mereka sebagai mayoritas di kanton tertentu memberi akses nyata terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat federal, yang secara historis bahkan tercermin dalam pengaturan Dewan Nasional berdasarkan blok linguistik hingga tahun 1974.

Selain itu, komitmen negara terhadap multibahasa juga diwujudkan melalui kebijakan redistribusi fiskal dan penyediaan layanan publik multibahasa, termasuk dukungan anggaran yang bersifat afirmatif bagi media penyiaran kelompok linguistik minoritas. Dengan demikian, sistem konsensus Swiss menghasilkan dampak hukum dan pemerintahan yang nyata dengan mengintegrasikan minoritas linguistik seperti penutur Romansh ke dalam struktur negara secara setara, berkelanjutan, dan bermakna.

Kesimpulan

Model power-sharing Swiss terbukti efektif sebagai kerangka hukum dan pemerintahan dalam mengelola masyarakat multietnis dan multilinguistik melalui kombinasi pengakuan konstitusional, federalisme, dan mekanisme konsensus. Pengakuan empat bahasa nasional, larangan diskriminasi berbasis bahasa, serta prinsip subsidiaritas menempatkan seluruh komunitas linguistik dalam posisi setara di hadapan hukum. Prinsip kolegialitas dalam Dewan Federal dan penerapan *magic formula* menginstitutionalisasi pembagian kekuasaan yang seimbang antarpartai, wilayah, dan kelompok bahasa, sehingga mencegah dominasi mayoritas dan menjaga stabilitas eksekutif. Efektivitas sistem ini diperkuat oleh demokrasi langsung dan kewajiban evaluasi kebijakan, yang memastikan pemerintahan tetap responsif dan akuntabel. Dampaknya terlihat nyata dalam integrasi minoritas linguistik seperti penutur Romansh, yang meskipun kecil secara demografis tetap memperoleh perlindungan, representasi, dan dukungan kebijakan publik, menjadikan *power-sharing*

Swiss bukan sekadar mekanisme politik, melainkan fondasi hukum-institusional bagi keberagaman yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abidin AS, Z., & Iqbal, F. M. (2025). Studi Komparasi Model Kepemimpinan Kepala Negara Ganda dalam Sistem Pemerintahan Diarki di Beberapa Negara. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v8i1.9085>
- Andina, M. (2023, July 24). *The ‘magic formula’ of Switzerland’s direct democracy*. <https://www.swissinfo.ch/eng/democracy/the-magic-formula-of-switzerland-s-direct-democracy/48673222>
- Belser, E. M., & Mazidi, S. (2022). *Linguistic Diversity in Switzerland: Going Beyond Territorial Accommodation* (Occasional Paper Series No. 57). Forum of Federations.
- Berner, E. K., & Berner, R. A. (2012). *Global Environment: Water, Air, and Geochemical Cycles - Second Edition*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400842766>
- Freiburghaus, R. (2024). Switzerland: Political Developments and Data in 2023: *Credit Suisse* Collapse—or: A Country in the Global Spotlight and Constrained by Global Interconnectedness. *European Journal of Political Research Political Data Yearbook*, 63(1), 491–512. <https://doi.org/10.1111/2047-8852.12440>
- Füglister, K., & Wasserfallen, F. (2014). Swiss federalism in a changing environment. *Comparative European Politics*, 12(4–5), 404–421. <https://doi.org/10.1057/cep.2014.28>
- Hosli, M. O., Martins Santos, L., & Boeree, H. (2025). A political-economic analysis of Swiss referendums 1848 to 2022: Turnout, acceptance rates and the double-majority threshold. *Constitutional Political Economy*, 36(2), 245–270. <https://doi.org/10.1007/s10602-025-09468-1>
- Iqbal, F. M. (2021). KUDETA MILITER MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 113–129. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.541>
- King-Savic, S. (2023). Who belongs to the swiss body politique—A diaspora perspective. *Frontiers in Political Science*, 5, 1145634. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1145634>
- Kley, A. (2023, June 29). Bundesverfassung (BV). *Historisches Lexikon Der Schweiz*. <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/009811/2011-05-03/>

- Linder, W., & Mueller, S. (2021). *Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies*. Springer Nature.
- Munadi, M. (2023). Etika Politik Generasi Milenial Menjelang Pemilu 2024. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 119–126. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.6056>
- Papadopoulos, Y., & Sager, F. (2023). Federal Government. In P. Emmenegger, F. Fossati, S. Häusermann, Y. Papadopoulos, P. Sciarini, & A. Vatter (Eds.), *The Oxford Handbook of Swiss Politics* (1st ed., pp. 195–213). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192871787.013.10>
- Razak, M. A., & Septaviana, D. (2022). Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 22. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.13990>
- Riyadi, A. D., & Bashori, B. (2025). Analisis Semantik terhadap Ayat-Ayat Sosial dalam Tafsir Yunan Yusuf. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 316–324. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i3.332>
- Stojanović, N. (2016). Party, Regional and Linguistic Proportionality Under Majoritarian Rules: Swiss Federal Council Elections. *Swiss Political Science Review*, 22(1), 41–58. <https://doi.org/10.1111/spsr.12208>
- Swiss Federal Constitution. (1999). *Federal Constitution of the Swiss Confederation*. Otoritas Federal Swiss. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/en>
- The portal of the Swiss government. (2025a, January 1). Departments. *Departments*. <https://www.admin.ch/gov/en/start.html>
- The portal of the Swiss government. (2025b, April 2). Decision-taking at meetings of the Federal Council. *The Federal Council*. <https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/tasks/decision-making.html>
- Trzciński, K. (2022). Consociationalism Meets Centripetalism: Hybrid Power-Sharing. *Nationalism and Ethnic Politics*, 28(3), 313–331. <https://doi.org/10.1080/13537113.2021.2004761>
- Wellings, T., Majumdar, S., Fricker, R. H., & Pournaras, E. (2023). *Improving City Life via Legitimate and Participatory Policy-making: A Data-driven Approach in Switzerland*. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2306.13696>